



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 725 / B.III / HK / 2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

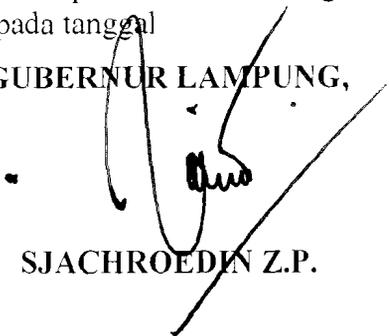
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1064/MK.7/2011 tanggal 22 Desember 2011 hal Hasil Evaluasi 9 (sembilan) Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

**EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dasar Hukum Mengingat | 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; | 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010; | Disempurnakan dengan adanya perubahan |
| 2 | Ketentuan Umum | Angka 18 Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan. Angka 24 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. | Dihapus. Dihapus. | Pasal 1 angka 18 dan angka 21 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. |
| 3 | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan Tempat Parkir. | Pasal 6 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir. | Pasal 6 disempurnakan |
| 4 | Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif | Pasal 7 Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. | Pasal 7 (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. | Pasal 7 disempurnakan dengan menambahkan ayat (2) baru |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| | | <p style="text-align: center;">BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 15</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 17</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> | <p>Pasal 15 dihapus karena pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> <p>Pasal 16 dihapus karena pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> |
| 5 | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 17</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> | <p>1. Pasal 17 ayat (4) dihapus, karena telah diatur dalam Pasal 20. 2. Pasal 17 ayat (5) Raperda dihapus, karena akan diatur dalam pasal baru</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> | <p>3. Pasal 17 ayat (6) Raperda disempurnakan dengan mengubah "penagihan " menjadi "pemungutan".</p> <p>4. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>1. Pasal 18 ayat (2) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT dan STRD.</p> <p>2. Dokumen SKRDKBT tidak diperlukan dalam pemungutan retribusi karena pemungutan retribusi bersifat official assessment, sedangkan dokumen STRD merupakan dokumen penagihan.</p> <p>3. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>Pasal 19 diubah menjadi BAB PENAGIHAN, urutan bab selanjutnya menyesuaikan</p> |

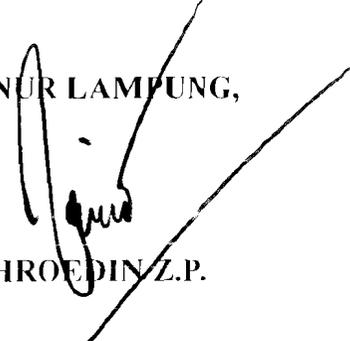
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| 6 | Keberatan | <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3)Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> | <p>Pasal 21 disempurnakan sesuai UU No. 28 Tahun 2009</p> |
| 7 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> | <p>Judul bab dan pasal 29 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|--|---|---|
| 8 | Penyidikan | <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :</p> <p>a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> | <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :</p> <p>a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>Tambahkan pasal baru, urutan pasal lain menyesuaikan</p> <p>Pasal 30 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|---|------------------------|
| 9 | Ketentuan Peralihan | <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan, dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | Pasal 32 disempurnakan |
| 10 | Ketentuan Penutup | <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Perparkiran Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2000 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | Pasal 34 disempurnakan |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL : _____

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dasar hukum Mengingat | 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; | 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010; | Dasar hukum angka 19 disempurnakan dengan adanya perubahan |
| 2 | Ketentuan Umum | Angka 31 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. | Dihapus. | Pasal 1 angka 31 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. |
| 3 | Nama, Objek dan Subjek Retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>a. Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>b. Rincian jenis objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil bus; b. mobil penumpang umum; c. mobil barang; d. kereta gandengan; e. kereta tempelan; dan f. kendaraan khusus. | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>(2) Rincian jenis objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil bus; b. mobil penumpang umum; c. mobil barang; d. kereta gandengan; dan e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan | <p>Pasal 2 disempurnakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 3 ayat (1) disempurnakan. 2. Sesuai dengan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Uji berkala hanya diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, namun apabila kendaraan khusus yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Raperda ini digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang maka dapat dilakukan pengujian kendaraan bermotor |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|------------------------------|
| | | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan di air, sesuai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.</p> | <p>Pasal 4 disempurnakan</p> |
| 4 | <p>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> | <p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan penggunaan tempat pengujian kendaraan bermotor.</p> | <p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan <u>jenis kendaraan bermotor dan frekuensi pengujian.</u></p> | <p>Pasal 6 disempurnakan</p> |
| 5 | <p>Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya administrasi ; b. biaya pengujian kendaraan bermotor; c. biaya buku uji; d. biaya tanda uji, baut, segel; dan e. biaya pengecatan dan pembuatan plat samping. | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a biaya administrasi ; b. biaya pengujian kendaraan bermotor; c. biaya kartu uji; d biaya tanda uji; dan e. biaya pengecatan dan pembuatan plat samping. | <p>Pasal 7 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| 6 | Struktur dan Besarnya Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p> <p>b. pengujian kendaraan bermotor /jasa pengujian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobil bus dan kendaraan khusus Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 2. mobil penumpang umum dan pick-up Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). 3. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4. mobil truck Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). <p>c. buku uji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);</p> <p>d. tanda uji (pengesahan), baut, segel Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); dan</p> <p>e. pengecatan dan pembuatan plat samping Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).</p> <p style="text-align: center;">BAB X SURAT-PENDAFTARAN Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.</p> <p>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,-;</p> <p>b. pengujian kendaraan bermotor /jasa pengujian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobil bus Rp. 15.000,- 2. mobil penumpang umum Rp. 6.000,- 3. mobil barang Rp 4. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 20.000,- <p>c. buku uji Rp. 10.000,-</p> <p>d. tanda uji (pengesahan) Rp. 5.000,-; dan</p> <p>e. pengecatan dan pembuatan plat samping Rp. 6.000,-</p> | <p>Kendaraan khusus yang digunakan sebagai kendaraan penumpang atau kendaraan barang cukup dikenakan tarif pengujian sebagaimana tarif pengujian mobil penumpang umum dan mobil barang.</p> <p>Pasal 13 dihapus karena pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> <p>Pasal 14 dihapus karena pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|--|
| 7 | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>1. Pasal 15 ayat (4) dihapus, karena telah diatur dalam Pasal 18. 2. Pasal 15 ayat (5) Raperda dihapus, karena akan diatur dalam pasal baru. 3. Pasal 15 ayat (6) Raperda disempurnakan dengan mengubah "penagihan " menjadi "pemungutan". 4. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>1. Pasal 18 ayat (2) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT dan STRD. 2. Dokumen SKRDKBT tidak diperlukan dalam pemungutan retribusi karena pemungutan retribusi bersifat official assessment, sedangkan dokumen STRD merupakan dokumen penagihan. 3. Urutan pasal disesuaikan</p> |
| 8 | Penagihan | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> | <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> | <p>Pasal 17 diubah menjadi bab penagihan</p> |

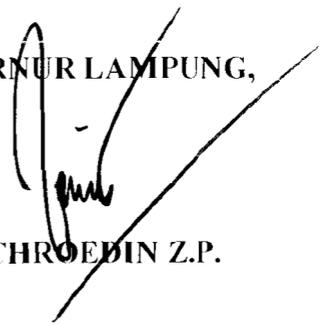
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|--|--|
| 9 | Keberatan | <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>Pasal 19 disempurnakan disesuaikan dengan UU No 28 Thn 2009</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|--|--|
| 10 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <p>a. nama dan alamat wajib retribusi;</p> <p>b. masa retribusi;</p> <p>c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</p> <p>d. alasan singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati</p> | <p>Pasal 23 dan Pasal 24 dihilangkan, karena pada Pasal 22 ayat (7) telah diamanatkan, akan diatur dengan Peraturan Bupati, maka tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah</p> <p>Judul BAB XIX disempurnakan</p> <p>1 Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2 Urutan pasal disesuaikan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|--|---|------------------------|
| 11 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa, | <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, | Pasal 28 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL :

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ketentuan Umum Nama, Objek dan Subjek Retribusi | <p>Angka 25 Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Angka 28 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, angkutan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.</p> | <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> | <p>Pasal 1 angka 25 dan angka 28 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Terminal.</p> <p>1 Sepanjang Pemda Kabupaten Lampung Selatan memiliki terminal barang atau di dalam terminal juga disediakan tempat parkir untuk angkutan barang, maka dapat dipungut Retribusi Terminal</p> <p>2 Pemungutan retribusi pada pos-pos tertentu terhadap angkutan barang/alat-alat berat/alat-alat besar yang melintasi jalan-jalan tertentu dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat arus lalu lintas barang dan jasa.</p> |
| 3 | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas Terminal.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka penggunaan fasilitas Terminal.</p> | <p>Pasal 6 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------|---|---|---|---|-------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|---|---------------------------|--|----|-----------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 4 | Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif | <p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup dan mengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan biaya administrasi.</p> | <p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang sebagaimana keuntungan yang pantas diterima pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.</p> | <p>Pasal 7 disempurnakan dengan menambah ayat (1) baru</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Struktur dan Besarnya Tarif | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan fasilitas yang digunakan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/Fasilitas</th> <th>Tarif</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Tempat menaik, memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/ atau barang bagi Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum serta Non-Bus</td> <td>Angkutan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. mobil penumpang;</td> <td>Rp. 2.000,- /sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. bus;</td> <td>Rp. 5.000,- /sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>c. bus eksekutif/AC;</td> <td>Rp. 6.000,- /sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>d. taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek); dan</td> <td>Rp. 2.000,- /sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>e. mobil barang</td> <td>Rp. 3.000,- /sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. mobil tronton, trailer dan truk gandengan.</td> <td>Rp. 6.000,- /sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Fasilitas | Tarif | 1 | 2 | 3 | Tempat menaik, memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/ atau barang bagi Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum serta Non-Bus | Angkutan : | | a. mobil penumpang; | Rp. 2.000,- /sekali masuk | b. bus; | Rp. 5.000,- /sekali masuk | c. bus eksekutif/AC; | Rp. 6.000,- /sekali masuk | d. taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek); dan | Rp. 2.000,- /sekali masuk | e. mobil barang | Rp. 3.000,- /sekali masuk | | f. mobil tronton, trailer dan truk gandengan. | Rp. 6.000,- /sekali masuk | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan fasilitas yang digunakan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/Fasilitas</th> <th>Tarif/sekali masuk</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tempat menaik, memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum serta non bus</td> <td>Angkutan: a. Mobil penumpang b. Bus c. Bus eksekutif/AC d. Taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek)</td> <td>Rp2.000,- Rp5.000,- Rp6.000,- Rp2.000,-</td> </tr> </tbody> </table> | No | Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Fasilitas | Tarif/sekali masuk | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Tempat menaik, memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum serta non bus | Angkutan: a. Mobil penumpang b. Bus c. Bus eksekutif/AC d. Taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek) | Rp2.000,- Rp5.000,- Rp6.000,- Rp2.000,- | <p>Pasal 9 disempurnakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Pemda Kabupaten Lampung Selatan memiliki terminal barang atau di dalam terminal juga disediakan tempat parkir untuk angkutan barang, maka dapat dipungut Retribusi Terminal. 2. Pemungutan retribusi pada pos-pos tertentu terhadap angkutan barang/alat-alat berat/alat-alat besar yang melintasi jalan-jalan tertentu dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat arus lalu lintas barang dan jasa |
| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Fasilitas | Tarif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempat menaik, memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/ atau barang bagi Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum serta Non-Bus | Angkutan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. mobil penumpang; | Rp. 2.000,- /sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. bus; | Rp. 5.000,- /sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. bus eksekutif/AC; | Rp. 6.000,- /sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek); dan | Rp. 2.000,- /sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. mobil barang | Rp. 3.000,- /sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. mobil tronton, trailer dan truk gandengan. | Rp. 6.000,- /sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Fasilitas | Tarif/sekali masuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tempat menaik, memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum serta non bus | Angkutan: a. Mobil penumpang b. Bus c. Bus eksekutif/AC d. Taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek) | Rp2.000,- Rp5.000,- Rp6.000,- Rp2.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | <p style="text-align: center;">BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <table border="1" data-bbox="1257 189 1991 437"> <tr> <td data-bbox="1257 189 1319 310">2</td> <td data-bbox="1319 189 1507 310">Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum</td> <td data-bbox="1507 189 1795 310">- Motor - Kendaraan R4 - Kendaraan R6 - Dsbnya</td> <td data-bbox="1795 189 1991 310">Rp. Rp. Rp.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1257 310 1319 437">3</td> <td data-bbox="1319 310 1507 437">Penyediaan tempat kegiatan usaha</td> <td data-bbox="1507 310 1795 437">- Sewa Kios - MCK/Toilet</td> <td data-bbox="1795 310 1991 437">Rp. Rp.</td> </tr> </table> | 2 | Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum | - Motor - Kendaraan R4 - Kendaraan R6 - Dsbnya | Rp. Rp. Rp. | 3 | Penyediaan tempat kegiatan usaha | - Sewa Kios - MCK/Toilet | Rp. Rp. | <p>3. Sesuai Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.</p> <p>Pasal 13 dihapus karena pemungutan Retribusi Terminal tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> <p>Pasal 14 dihapus karena pemungutan Retribusi Terminal tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> |
| 2 | Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum | - Motor - Kendaraan R4 - Kendaraan R6 - Dsbnya | Rp. Rp. Rp. | | | | | | | | | |
| 3 | Penyediaan tempat kegiatan usaha | - Sewa Kios - MCK/Toilet | Rp. Rp. | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--|
| 6 | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan penundaan pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | Judul Bab XII diubah dan Pasal 15 disempurnakan |
| 7 | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>1. Pasal 18 ayat (2) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT dan STRD. 2. Dokumen SKRDKBT tidak diperlukan dalam pemungutan retribusi karena pemungutan retribusi bersifat official assessment, sedangkan dokumen STRD merupakan dokumen penagihan. 3. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| 8 | Penagihan | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> | <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN Pasal ..</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> | Pasal 17 diubah menjadi Bab dan pasal Penagihan |

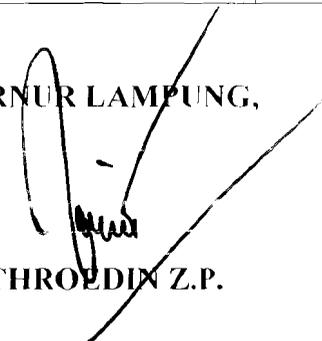
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|--|--|---|
| 9 | Keberatan | <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV KEBERATAN Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV KEBERATAN Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>Pasal 19 disempurnakan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|---|
| 10 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>Pasal 23 dan pasal 24 dihilangkan karena dalam pasal 22 ayat (7) Raperda tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sudah diamankan akan diatur dengan Perbup.</p> <p>Pasal 24 dihilangkan</p> <p>Judul bab XIX disempurnakan</p> <p>1. Ditambahkan 1 (satu) pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai tata penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|--|--|------------------------|
| 11 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan, dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang di bawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi, | Pasal 28 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--|---|------------------------|
| 12 | Ketentuan Peralihan | <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | Pasal 30 disempurnakan |
| 13 | Ketentuan Penutup | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | Pasal 32 disempurnakan |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL :

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Diktum Menimbang | <p>a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang merupakan obyek retribusi daerah serta merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> | <p>a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> | <p>Kalimat huruf a disempurnakan</p> <p>Kalimat huruf b disempurnakan</p> |
| 2 | Dasar hukum Mengingat | 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); | 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); | Dasar Hukum angka 22 disempurnakan dengan adanya perubahan |
| 3 | Ketentuan Umum | <p>Angka 19</p> <p>Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menentukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</p> | Dihapus. | Pasal 1 angka 19 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--|
| 4 | Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:</p> <p>a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan</p> <p>b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.</p> <p style="text-align: center;">BAB X SURAT PENDAFTARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.</p> <p>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> | <p>Pasal 7 disempurnakan</p> <p>Pasal 13 dihapus karena pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi cukup berdasarkan NJOP yang tercantum dalam SPPT menara telekomunikasi.</p> <p>Pasal 14 dihapus karena pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi cukup berdasarkan NJOP yang tercantum dalam SPPT menara telekomunikasi.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|---|--|
| 5 | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> | Judul bab dan isi Pasal 15 disempurnakan |
| 6 | Penagihan | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN). (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang</p> | Judul bab XIII dihilangkan dan isi pasal 16 disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT dan STRD Pasal 17 diubah menjadi bab dan pasal yang mengatur penagihan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|--|--|
| 7 | Keberatan | <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masa retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. alasan singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> | <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>Pasal 19 disempurnakan disesuaikan dengan UU No, 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 23 dan Pasal 24 dihilangkan, karena dalam Raperda dalam pasal 22 Ayat (7) sudah di amankan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan perbup</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|--|--|
| 8 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | <p>Judul bab disempurnakan</p> <p>1. Ditambah 1 (satu) Pasal yang mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> |
| 9 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> | <p>Pasal 28 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | |

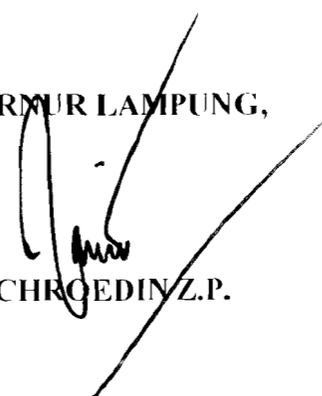
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|---|---|
| 10 | Pidana | <p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar;</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | <p>1. Pasal 29 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan atas denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> |

ERNUR L/
/B.III/H

Ketera
5

ka 11 disen

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

ka 16 disen

al 1 angka :
na tidak dip
im pemung
Usaha Peri

al 3 di
gan
gecualian o
Usaha Peri

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--|
| 4 | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat izin usaha perikanan diberikan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan.</p> | Pasal 6 disempurnakan |
| 5 | Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut.</p> | Pasal 7 disempurnakan |
| 6 | Struktur dan Besarnya Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan dan kapal pengangkut ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. 5 s/d 6 GT = Rp. 200.000,-/Kapal</p> <p>b. 7 s/d 8 GT = Rp. 300.000,-/kapal</p> <p>c. 9 s/d 10 GT = Rp. 400.000,-/kapal</p> <p>(2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan pembesaran ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. tambak intensif = Rp. 300.000,-/ha</p> <p>b. tambak tradisional = Rp. 50.000,-/ha</p> <p>c. kolam tanpa konstruksi = Rp. 50.000,-/ha</p> <p>d. kolam konstruksi beton = Rp. 100.000,-/ha</p> <p>e. karamba / jaring apung = Rp. 100.000,-/unit</p> <p>f. rakit / tali = Rp. 25.000,-/ha</p> <p>g. kerang mutiara = Rp. 20.000,-/unit</p> <p>h. lainnya = Rp. 50.000,-/unit usaha</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan dan kapal pengangkut ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. >5 s/d 6 GT = Rp. 200.000,-/Kapal</p> <p>b. 7 s/d 8 GT = Rp. 300.000,-/kapal</p> <p>c. 9 s/d 10 GT = Rp. 400.000,-/kapal</p> <p>(2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan pembesaran ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. tambak intensif = Rp. 300.000,-/ha</p> <p>b. tambak tradisional = Rp. 50.000,-/ha</p> <p>c. kolam tanpa konstruksi = Rp. 50.000,-/ha</p> <p>d. kolam konstruksi beton = Rp. 100.000,-/ha</p> <p>e. karamba / jaring apung = Rp. 100.000,-/unit</p> <p>f. rakit / tali = Rp. 25.000,-/ha</p> <p>g. kerang mutiara = Rp. 20.000,-/unit</p> <p>h. lainnya = Rp. 50.000,-/unit usaha</p> | <p>1. Pasal 9 ayat (1) huruf a disempurnakan dengan menambah "lebih besar atau sama dengan", sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>2. Terhadap izin pembudidayaan ikan, kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, sesuai dengan Pasal 39 Permen Kelautan dan Perikanan No. PER 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|--|
| / | <p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(3) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan perbenihan ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. udang windu = Rp. 0,05,-/ekor b. udang putih = Rp. 0,1,-/ekor c. kerapu = Rp. 100,-/ekor d. bandeng = Rp. 5,-/ekor e. ikan air tawar = Rp. 5,-/ekor f. ikan lain-lain = Rp. 10,-/ekor</p> <p>(4) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pengumpulan atau pengolahan atau perdagangan ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. udang windu = Rp. 100,-/kg b. udang putih = Rp. 100,-/kg c. lobster = Rp. 500,-/kg d. kerapu = Rp. 250,-/kg e.dst.</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(3) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan perbenihan ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. udang windu = Rp./..... b. udang putih = Rp./..... c. kerapu = Rp./..... d. bandeng = Rp./..... e. ikan air tawar = Rp./..... f. ikan lain-lain = Rp./.....</p> <p>(4) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pengumpulan atau pengolahan atau perdagangan ikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Usaha Skala Kecil/Unit - s.d kg/Bulan Rp.</p> <p>b. Usaha Skala Menengah/Unit - > s.d < kg/bulan Rp.</p> <p>c. Usaha Skala Besar/Unit kg/Bulan Rp.</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>3. Penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan ikan harus dikaitkan dengan luas lahan yang digunakan untuk pembenihan ikan bukan berdasarkan jumlah benih ikan. (misalnya Rp...../ha)</p> <p>4. Penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pemasaran atau pengolahan ikan dikaitkan dengan volume usaha pemasaran atau pengolahan tersebut. (Misalnya untuk usaha skala kecil yang menghasilkan 0 s.d 250 kg per bulan, dll).</p> <p>1. Pasai 14 ayat (2) dihapus karena pemungutan retribusi bersifat official assessment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT.</p> <p>2. Pasal 14 ayat (3) disempurnakan.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|--|---|
| 8 | Penagihan | <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN). (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> | <p>1. Pasal 15 ayat (4) dihapus, karena telah diatur dalam Pasal 18. 2. Pasal 15 ayat (5) Raperda dihapus, karena akan diatur dalam pasal baru. 3. Pasal 15 ayat (6) Raperda disempurnakan dengan mengubah "penagihan" menjadi "pemungutan". 4. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>Judul bab dihilangkan dan isi Pasal 16 disempurnakan dan menghapus dokumen SKRDKBT dan STRD</p> <p>Pasal 17 diubah menjadi bab dan pasal yang mengatur tentang penagihan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|--|---|--|
| 9 | Keberatan | <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>Pasal 19 disempurnakan disesuaikan dengan UU No. 28 Thn 2009 dengan menghapus dokumen SKRDKBT</p> |

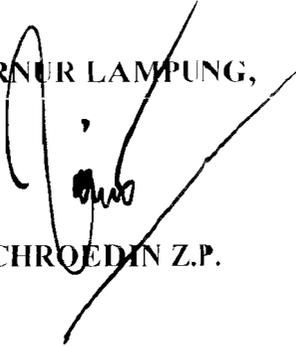
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|--|---|
| 10 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <p>a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p>b. masa retribusi;</p> <p>c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</p> <p>d. alasan singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | <p>Pasal 23 dan Pasal 24 dihilangkan, karena dalam Pasal 22 ayat (7) Raperda sudah diamanatkan dengan Peraturan Bupati</p> <p>Judul bab disempurnakan</p> <p>1. Ditambah 1 (satu) Pasal yang mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|--|--|------------------------|
| 11 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; | <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; | Pasal 28 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|--|---|
| 12 | Pidana | <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar;</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> | <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | <p>1. Pasal 29 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan atas denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--|---|------------------------|
| 13 | Ketentuan Peralihan | <p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | Pasal 30 disempurnakan |
| 14 | Ketentuan Penutup | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2000 tentang izin usaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2000 tentang izin usaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.</p> | Pasal 32 disempurnakan |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL : _____

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ketentuan Umum | <p>Angka 35 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</p> | Dihapus. | Pasal 1 angka 35 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. |
| 2 | Nama, Objek dan Subjek Retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> | Pasal 2 disempurnakan |
| 3 | Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil hanya memperitungkan biaya cetak dan pengadministrasian.</p> | Pasal 7 disesuaikan dengan Pasal 152 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009. |
| 4 | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p>(2) Besarnya tarif adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk.....Rp. 10.000,-</p> <p>b. Kartu Keluarga.....Rp. 2.500,-</p> | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p>(2) Besarnya tarif adalah sebagai berikut</p> <p>a. Kartu Tanda PendudukRp. 10.000,-</p> <p>b. Kartu Keluarga.....Rp. 2.500,-</p> <p>c. Akta Perkawinan.....Rp. 60.000,-</p> <p>d. Akta Perceraian.....Rp. 60.000,-</p> | <p>1. Pasal 9 ayat (2) huruf h disempurnakan.</p> <p>2. Pasal 9 ayat (2) huruf i dihapus karena tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>c. Akta Perkawinan.....Rp. 60.000,-</p> <p>d. Akta Perceraian.....Rp. 60.000,-</p> <p>e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.....Rp. 60.000,-</p> <p>f. Akta Ganti Nama bagi WNA.....Rp. 100.000,-</p> <p>g. Akta Kematian.....Rp. 10.000,-</p> <p>h. Perbaikan Akta-Akta Catatan Sipil.....Rp. 5.000,-</p> <p>i. Surat-keterangan.....Rp. 3.000,-</p> <p style="text-align: center;">BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD</p> <p>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 60.000,-</p> <p>f. Akta Ganti Nama bagi WNARp. 100.000,-</p> <p>g. Akta Kematian..... Rp. 10.000,-</p> <p>h. Penerbitan kembali Akta-Akta Catatan Sipil yang rusak atau hilang.....Rp. 5.000,-</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| 5 | <p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>1. Pasal 15 ayat (4) dihapus, karena telah diatur dalam Pasal 18. 2. Pasal 15 ayat (5) Raperda dihapus, karena akan diatur dalam pasal baru. 3. Pasal 15 ayat (6) Raperda disempurnakan dengan mengubah "penagihan" menjadi "pemungutan" 4. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>Judul bab dihilangkan dan Pasal 16 disempurnakan, dengan menghilangkan Dokumen SKRDKBT dan STRD</p> |
| 6 | <p>Penagihan</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> | <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> | <p>Pasal 17 diubah menjadi bab dan pasal baru yang mengatur tentang penagihan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|---|---|
| 7 | Keberatan | <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> | <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | <p>Pasal 19 disempurnakan, sesuai ketentuan UU No 28 Tahun 2009</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| 8 | Pengembalian Kelebihan Pembayaran | <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masa retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. alasan singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> | - | <p>Pasal 23 dan Pasal 24 dihilangkan, karena dalam Pasal 22 ayat (7) Raperda sudah diamanatkan diatur dengan Peraturan Bupati</p> |
| 9 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p>BAB XIX</p> <p>KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal 27</p> | <p>BAB XIX</p> <p>PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG</p> <p>KEDALUWARSA</p> <p>Pasal 27</p> | <p>Pasal 27 judul bab disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|---|--|
| 10 | Penyidikan | <p>-</p> <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; | <p style="text-align: center;">Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambah 1 (satu) Pasal yang mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. <p>Pasal 28 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|---|---|
| 11 | Pidana | <p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar;</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | <p>3. Pasal 29 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan atas denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> |
| 12 | Ketentuan Peralihan | <p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30 disempurnakan, dengan merubah angka 5 menjadi angka 3, karena kedaluwarsa penagihan adalah 3 tahun</p> |
| 13 | Ketentuan Penutup | <p>Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2009, tentang Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p>Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2009, tentang Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> | <p>Pasal 32 disempurnakan</p> |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.III/HK/2011

TANGGAL : _____

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dasar hukum mengingat | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); | Angka 11 disempurnakan dengan adanya perubahan PP 27 Thn 1983 |
| | Ketentuan Umum | Angka 21 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. | Dihapus. | Pasal 1 angka 21 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan. |
| 3 | Nama, Objek dan Subjek Retribusi | <p>Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas setiap pemotongan hewan/unggas yang dilakukan di rumah potong hewan/unggas atau tempat pemotongan hewan lainnya.</p> <p>Pasal 4 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan/unggas/di rumah pemotongan hewan/unggas milik pemerintah dan/atau tempat pemotongan hewan/unggas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> | <p>Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 4 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/ memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> | <p>Pasal 2 disempurnakan</p> <p>Pasal 4 ayat (1) disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 4 | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | <p>(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan rumah potong hewan diberikan.</p> | <p>(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan pelayanan, yang diberikan di rumah potong hewan</p> | Pasal 6 disempurnakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Biaya pemeriksaan hewan/unggas per ekor sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem) adalah sebagai berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 25.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 15.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>d. ayam/unggas</td><td style="text-align: right;">Rp 150,00,-</td></tr> </table> <p>(2) Biaya pemakaian kandang (per ekor) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 15.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> </table> <p>(3) Biaya pemakaian tempat pemotongan (per ekor) .</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> <tr><td>d. ayam/unggas</td><td style="text-align: right;">Rp 50,00,-</td></tr> </table> <p>(4) Biaya tempat untuk pelayuan (per ekor) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> </table> <p>(5) Biaya retribusi pemeriksaan daging/karkas yang berasal dari luar daerah</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi, kerbau, kuda</td><td style="text-align: right;">Rp 500,00,-/kg</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 500,00,-/kg</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 100,00,-/kg</td></tr> <tr><td>d. ayam/unggas</td><td style="text-align: right;">Rp. 25,00,-/kg</td></tr> </table> | a. sapi/kerbau | Rp 25.000,00,- | b. babi | Rp 15.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 10.000,00,- | d. ayam/unggas | Rp 150,00,- | a. sapi/kerbau | Rp 15.000,00,- | b. babi | Rp 10.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | b. babi | Rp 5.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | d. ayam/unggas | Rp 50,00,- | a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | b. babi | Rp 5.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | a. sapi, kerbau, kuda | Rp 500,00,-/kg | b. babi | Rp 500,00,-/kg | c. kambing/domba | Rp 100,00,-/kg | d. ayam/unggas | Rp. 25,00,-/kg | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Biaya pemeriksaan hewan/unggas per ekor sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem) adalah sebagai berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 25.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 15.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>d. ayam/unggas</td><td style="text-align: right;">Rp 150,00,-</td></tr> </table> <p>(2) Biaya pemakaian kandang (per ekor) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 15.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> </table> <p>(3) Biaya pemakaian tempat pemotongan (per ekor) .</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> <tr><td>d. ayam/unggas</td><td style="text-align: right;">Rp 50,00,-</td></tr> </table> <p>(4) Biaya tempat untuk pelayuan (per ekor) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi/kerbau</td><td style="text-align: right;">Rp 10.000,00,-</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 5.000,00,-</td></tr> </table> <p>(5) Biaya retribusi pemeriksaan daging/karkas yang berasal dari luar daerah yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan telah diperiksa oleh petugas yang berwenang di daerah asal:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>a. sapi, kerbau, kuda</td><td style="text-align: right;">Rp 500,00,-/ kg</td></tr> <tr><td>b. babi</td><td style="text-align: right;">Rp 500,00,-/ kg</td></tr> <tr><td>c. kambing/domba</td><td style="text-align: right;">Rp 100,00,-/ kg</td></tr> <tr><td>d. ayam/unggas</td><td style="text-align: right;">Rp. 25,00,-/ kg</td></tr> </table> | a. sapi/kerbau | Rp 25.000,00,- | b. babi | Rp 15.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 10.000,00,- | d. ayam/unggas | Rp 150,00,- | a. sapi/kerbau | Rp 15.000,00,- | b. babi | Rp 10.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | b. babi | Rp 5.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | d. ayam/unggas | Rp 50,00,- | a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | b. babi | Rp 5.000,00,- | c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | a. sapi, kerbau, kuda | Rp 500,00,-/ kg | b. babi | Rp 500,00,-/ kg | c. kambing/domba | Rp 100,00,-/ kg | d. ayam/unggas | Rp. 25,00,-/ kg | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pemeriksaan ulang daging bagi hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan seyogianya termasuk dalam tarif pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong. 2. Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar daerah tidak diperlukan karena kegiatan pemeriksaan tersebut telah dilakukan di daerah asal. 3. Pengenaan retribusi atas pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah merintangai arus lalu lintas barang antar daerah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 4. Pemda dapat melakukan pemeriksaan ulang daging dari luar daerah sepanjang tidak diwajibkan dan pemilik daging/pedagang daging memerlukan pelayanan tersebut atau daging tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan telah diperiksa oleh petugas yang berwenang di daerah asal. |
| a. sapi/kerbau | Rp 25.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 15.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. ayam/unggas | Rp 150,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 15.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. ayam/unggas | Rp 50,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi, kerbau, kuda | Rp 500,00,-/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 500,00,-/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 100,00,-/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. ayam/unggas | Rp. 25,00,-/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 25.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 15.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. ayam/unggas | Rp 150,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 15.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. ayam/unggas | Rp 50,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi/kerbau | Rp 10.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 5.000,00,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. sapi, kerbau, kuda | Rp 500,00,-/ kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. babi | Rp 500,00,-/ kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. kambing/domba | Rp 100,00,-/ kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. ayam/unggas | Rp. 25,00,-/ kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| 6 | <p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran</p> | <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> | <p>1. Pasal 14 ayat (2) dihapus karena pemungutan retribusi bersifat official assessment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT.</p> <p>2. Pasal 14 ayat (3) disempurnakan.</p> <p>Judul bab disempurnakan dan pasal 15 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (4), (5) dan ayat (6), karena ayat tersebut mengatur sanksi administrasi dan penagihan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|--|---|--|
| 7 | Penagihan | <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati</p> | <p>Judul bab dihilangkan dan pasal 16 disempurnakan, dengan menghilangkan Dokumen SKRDKBT dan STRD</p> <p>Pasal 17 diubah menjadi bab dan pasal baru yang mengatur tentang penagihan</p> |
| 8 | Keberatan | <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal ..</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> | <p>a. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT</p> <p>b. Urutan pasal disesuaikan.</p> |

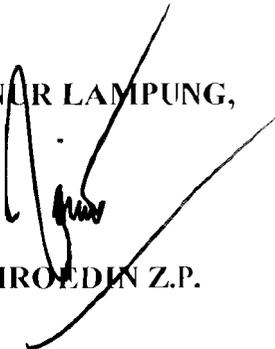
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|--|
| 9 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> | <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>Judul bab disempurnakan</p> <p>Tambahkan pasal baru, urutan pasal lain menyesuaikan</p> |
| 10 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>Pasal 28 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|--|--|
| 11 | Pidana | <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar; (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> | <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal ... (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar. (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | <p>5. Pasal 29 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan atas denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009. 6. Urutan pasal agar disesuaikan</p> |
| 12 | Ketentuan Peralihan | <p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30 disempurnakan, dengan merubah angka 5 menjadi angka 3, karena kedaluwarsa penagihan adalah 3 tahun</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|---|--|------------------------|
| 13 | Ketentuan Penutup | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> | Pasal 32 disempurnakan |

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL :

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dasar hukum mengingat | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); | Angka 11 disempurnakan dengan adanya perubahan PP 27 Thn 1983 |
| 2 | Ketentuan Umum | <p>Angka 14 Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan. Angka 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</p> | <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> | <p>Pasal 1 angka 14 dan angka 17 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/-Pesanggrahan/Villa.</p> |
| 3 | Nama, Objek dan Subjek Retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan diberikan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> | <p>Pasal 2 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------|----------------|---|------------------|------------|--------------|--|----|-----------------|-------|------------|---|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 4 | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan tempat dan jangka waktu pelayanan fasilitas diberikan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian penginapan/pesanggrahan/villa</p> | Pasal 6 disempurnakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup dan mengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan biaya administrasi.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.</p> | Pasal 7 disempurnakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Struktur dan Besarnya Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan fasilitas yang digunakan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="481 899 1252 993"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>GOLONGAN</th> <th>RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Cottage Menginap</td> <td>1 x 24 Jam</td> <td>200.000/Unit</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">SURAT PENDAFTARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD</p> <p>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | NO | JENIS PELAYANAN | GOLONGAN | RETRIBUSI (Rp) | - | Cottage Menginap | 1 x 24 Jam | 200.000/Unit | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1274 799 1999 893"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS FASILITAS</th> <th>WAKTU</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Cottage. Menginap</td> <td>1 x 24 Jam</td> <td>200.000/Unit</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">-</p> | NO | JENIS FASILITAS | WAKTU | TARIF (Rp) | - | Cottage. Menginap | 1 x 24 Jam | 200.000/Unit | Pasal 9 disempurnakan |
| NO | JENIS PELAYANAN | GOLONGAN | RETRIBUSI (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Cottage Menginap | 1 x 24 Jam | 200.000/Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | JENIS FASILITAS | WAKTU | TARIF (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Cottage. Menginap | 1 x 24 Jam | 200.000/Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pasal 13 dihapus karena pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/-Pesanggrahan/Villa tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--|
| 7 | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>Pasal 14 dihapus karena pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/-Pesangrahan/Villa tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> <p>Judul bab dan pasal disempurnakan dengan menghilangkan ayat (4), (5) dan ayat (6), karena ayat tersebut mengatur sanksi administrasi dan penagihan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|--|---|---|
| 8 | Penagihan | <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>Judul bab dihilangkan dan pasal 16 disempurnakan dengan menghilangkan Dokumen SKRDKBT dan STRD</p> <p>Pasal 17 diubah menjadi bab dan pasal baru yang mengatur tentang penagihan</p> |

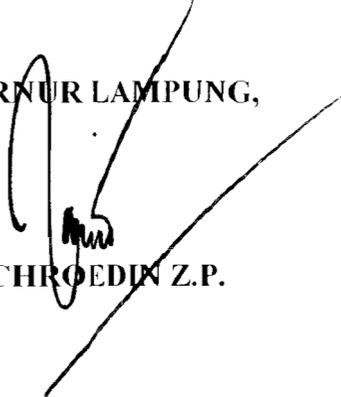
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|--|
| | | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> | <p>1 Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT</p> <p>2 Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| 9 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27</p> | <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 27</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>judul bab disempurnakan</p> <p>Tambahkan pasal baru, urutan pasal lain menyesuaikan</p> |
| 10 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>Pasal 28 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|---|
| | | <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|--|---|
| 11 | Pidana | <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar;</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> | <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | <p>1. Pasal 29 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan atas denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> |
| 12 | Ketentuan Peralihan | <p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30 disempurnakan, dengan merubah angka 5 menjadi angka 3, karena kedaluwarsa penagihan adalah 3 tahun</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|---|---|------------------------|
| 13 | Ketentuan Penutup | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p> | Pasal 32 disempurnakan |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL :

EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dasar Hukum mengingat | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); | Angka 11 disempurnakan dengan adanya perubahan Perstursn Pemerintah No 27 Tahun 1983 |
| 2 | Ketentuan Umum | <p>Angka 14 Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Angka 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</p> | <p>Dihapus</p> <p>Dihapus.</p> | <p>Pasal 1 angka 14 dan angka 17 dihapus karena tidak diperlukan dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> |
| 3 | Nama, onyek dan subyek retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau oleh Pemerintah Daerah.</p> | <p>Pasal 2 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|------|---|-----------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|------------------|--|---|----|-----------------|------------|--------|----------|-------------|---|-----------------|---|---|---|---|----|-----------------|----------------|-----------------|------------|---|---------|---|-------------------------|--------------------------------|----|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|---|----------|-------|-------|-----|---|
| 4 | Golongan dan jenis retribusi | <p>Pasal 5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Usaha.</p> | <p>Pasal 5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p> | Pasal 5 disempurnakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cara mengukur tingkat penggunaan jasa | <p>Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi, dan jangka waktu pelayanan fasilitas diberikan.</p> | <p>Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi jenis, golongan dan jangka waktu pelayanan fasilitas diberikan.</p> | Pasal 6 disempurnakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif | <p>Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup dan mengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan biaya administrasi.</p> <p>Pasal 9 (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan fasilitas yang digunakan. (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="470 982 1249 1338"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>GOLONGAN</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tempat Rekreasi</td> <td>Masuk</td> <td>-Anak-anak -Dewasa</td> <td>5.000,-/orang 10.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tempat Olahraga</td> <td>- Stadion. - Lapangan tenis - Lapangan. - Kolam renang.</td> <td>- - - -</td> <td>3.000,-/orang 5.000,-/orang 1.000,-/orang 5.000,-/orang</td> </tr> </tbody> </table> | NO | JENIS PELAYANAN | GOLONGAN | (Rp) | 1 | Tempat Rekreasi | Masuk | -Anak-anak -Dewasa | 5.000,-/orang 10.000,-/orang | 2 | Tempat Olahraga | - Stadion. - Lapangan tenis - Lapangan. - Kolam renang. | - - - - | 3.000,-/orang 5.000,-/orang 1.000,-/orang 5.000,-/orang | <p>Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>Pasal 9 Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi</p> <table border="1" data-bbox="1290 883 1989 1131"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Pengunjung</th> <th>Parkir</th> <th>asuransi</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tempat Rekreasi</td> <td>- pejalan kaki - sepeda motor -sedan /jeep -mini bus -bus besar</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retribusi Tempat Olahraga</p> <table border="1" data-bbox="1290 1156 1989 1536"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Tarif Retribusi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Stadion</td> <td>a Latihan b. Pertandingan c. kegiatan lainnya</td> <td>.....</td> <td>Per/ .. Per/ .. Per/ ...</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>-Lapangan Tennis</td> <td>a Latihan b.Pertandingan</td> <td>.....</td> <td>Per/ Per/</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kolam renang</td> <td>a. Latihan b. pertandingan</td> <td>.....</td> <td>Per/ Per/</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lapangan</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>Per</td> </tr> </tbody> </table> | NO | JENIS PELAYANAN | Pengunjung | Parkir | asuransi | Jumlah (Rp) | 1 | Tempat Rekreasi | - pejalan kaki - sepeda motor -sedan /jeep -mini bus -bus besar | | | | NO | JENIS PELAYANAN | Jenis Kegiatan | Tarif Retribusi | Keterangan | 1 | Stadion | a Latihan b. Pertandingan c. kegiatan lainnya | | Per/ .. Per/ .. Per/ ... | 2. | -Lapangan Tennis | a Latihan b.Pertandingan | | Per/ Per/ | 3 | Kolam renang | a. Latihan b. pertandingan | | Per/ Per/ | 4 | Lapangan | | | Per | <p>Pasal 7 disempurnakan</p> <p>Pasal 9 disempurnakan agar jenis pelayanan dibedakan dan penggunaan lapangan tenis dan stadion tarif retribusi bkn per/orang tetapi per/group</p> |
| NO | JENIS PELAYANAN | GOLONGAN | (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tempat Rekreasi | Masuk | -Anak-anak -Dewasa | 5.000,-/orang 10.000,-/orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tempat Olahraga | - Stadion. - Lapangan tenis - Lapangan. - Kolam renang. | - - - - | 3.000,-/orang 5.000,-/orang 1.000,-/orang 5.000,-/orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | JENIS PELAYANAN | Pengunjung | Parkir | asuransi | Jumlah (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tempat Rekreasi | - pejalan kaki - sepeda motor -sedan /jeep -mini bus -bus besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | JENIS PELAYANAN | Jenis Kegiatan | Tarif Retribusi | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stadion | a Latihan b. Pertandingan c. kegiatan lainnya | | Per/ .. Per/ .. Per/ ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | -Lapangan Tennis | a Latihan b.Pertandingan | | Per/ Per/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kolam renang | a. Latihan b. pertandingan | | Per/ Per/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lapangan | | | Per | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| 7 | Penetapan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut engan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> | <p style="text-align: center;">BAB XII PENETAPAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> | <p>Pasal 13 dihapus karena pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> <p>Pasal 14 dihapus karena pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak memerlukan pendataan dari wajib retribusi sehingga tidak memerlukan dokumen SPdORD.</p> <p>Judul Bab dan Pasal 15 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|--|---|--|
| Penagihan | | <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).</p> <p>(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hari pemungutan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pelayanan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB... PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah ... (...) hari sejak jatuh tanggal dan jatuh tempo pembayaran.</p> | <p>Judul Bab dihilangkan dan Pasal 16 disempurnakan</p> <p>Pasal 17 diubah menjadi Bab dan Pasal yang mengatur tentang penagihan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|--|--|---|
| 9 | Keberatan | <p>Pasal 49</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masa retribusi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. alasan singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> | <p>(4) Dalam jangka waktu.. (..) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> | <p>a. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT.</p> <p>b. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>Pasal 23 dan Pasal 24 dihilangkan karena dalam Pasal 22 ayat (7) Raperda Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diamanatkan diatur dengan Peraturan Bupati</p> |

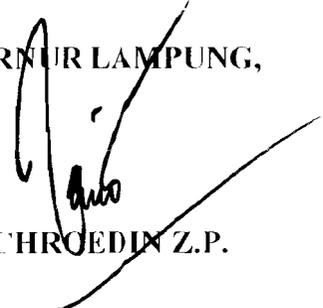
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|--|
| 10 | Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> | <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati</p> | <p>Judul bab disempurnakan</p> <p>Tambahkan pasal baru</p> |
| 11 | Penyidikan | <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> | <p style="text-align: center;">BAB XX PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> | <p>Pasal 28 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|--|---|
| 12 | Ketentuan Pidana | <p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar;</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> | <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | <p>1. Pasal 29 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan atas denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> |
| 13 | Ketentuan Peralihan | <p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> | <p>Pasal 30 disempurnakan</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|--|--|---|
| 14 | Ketentuan Penutup | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun.... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p> | <p>Pasal 32 disempurnakan</p> <p>Pasal 33 disempurnakan</p> |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.